

No. 1, Th. XVII, Februari 1998



# cakrawala pendidikan

MAJALAH ILMIAH KEPENDIDIKAN

- Upaya Peningkatan Kualitas Naskah Berkala Ilmiah
- Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Tinggi Kaitannya dengan Pengembangan IKIP Menjadi Universitas
- Perguruan Tinggi Sebagai Wahana Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia
- Meramalkan Warna Zat Pewarna dengan Pendekatan Partikel dalam Kotak 1 - Dimensi
- Modifikasi Sintesis Zeolit A Sebagai Bahan Pengisi Deterjen (Bulder)
- Radikal Bebas, Peroksidasi Lipida dan Antioksidan
- Pengembangan Mikropun OPTIK sebagai Alternatif Dalam Komunikasi Serat Optik
- Konservasi, Diversifikasi dan Peningkatan Efisiensi untuk Mengantisipasi Krisis Energi
- Memahami Konflik Orang Tua dengan Anak
- Peranan Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah
- Postmodernisme Dalam Sastra
- Beberapa Masalah Penyusunan Kamus Ekabahasa (Jawa-Jawa)
- Pendidikan Kesenian Sebagai Penunjang Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- Perang Diponegoro: Antara Gerakan Mahdisme dan Mistisisme Islam
- Kecerdasan Emosional (Tinjauan Buku Secara Kritis)

PENERBIT LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IKIP YOGYAKARTA

ISSN : 0216 - 1370

---

---

## CAKRAWALA PENDIDIKAN

---

---

### Majalah Ilmiah Kependidikan

**Visi** : Menumbuh Cakrawala Berfikir Partisipatif dalam Pembangunan Nasional melalui Pembudayaan IPTEKS.

**Misi** : Pemberdayaan dan Penajaman Orientasi Masyarakat Pendidikan Indonesia dalam Pembangunan Nasional.

**Penerbit**

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP YOGYAKARTA

**Pelindung**

Prof. Dr. Djohar, M.S.  
(Rektor IKIP YOGYAKARTA)

**Penasehat**

Drs. Djemari Mardapi, M.Pd., Ph.D.  
(Pembantu Rektor I)

**Penanggungjawab**

Drs. Sukidjo, M.Pd.  
(Ketua LPM IKIP YOGYAKARTA)

**Ketua Redaksi**

Prof. Dr. Aliyah Rosyid, M.Pd.

**Sekretaris Redaksi**

Drs. H. Sukoco, M.Pd.  
Drs. Bambang Subali, MS

**Anggota Redaksi**

Prof. Dr. H. Sodik A. Kuntoro, M.Ed.  
Dr. Sumarno, MA  
Dr. Wuryadi, MS.  
Dra. Darmiyati Zuchdi, M.Sc. Ed.D.  
Dr. Nurfiq Aznam, Apt., SU.  
Dr. Sarbini Hs.  
Dr. Soenarto, MA., M.Sc.  
Dr. dr. BM. Woro Kushartanti, MS.

**Editor Bahasa**

Drs. Kastam Syamsi, M.Ed.

**Tata Usaha/Pelaksana**

Drs. Supantoro (Kabag TU LPM)  
Siti Mariana, S.Sos. (Kasubag Umum. LPM)  
Sri Wiyati, B.Sc. (Kasubag Program Data & Inf. LPM)  
Heni Susilowati (LPM)  
Widiyanto, BBA. (LPM)

**Alamat Redaksi/Tata Usaha**

LPM IKIP YOGYAKARTA  
Kampus Karang malang, Yogyakarta  
Telepon 586168 psw 233, 346, 359 dan 273

**SK Menteri Penerangan RI**

STT Nomor 820/SK DITJEN PPG  
STT/1981 Tanggal 9 Maret 1981

**SK Rektor IKIP YOGYAKARTA**

Nomor 036 Tahun 1998

ISSN : 0216 - 1370

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	iii
1. Upaya Peningkatan Kualitas Naskah Berkala Ilmiah. Oleh : Bambang Subali .....	1
2. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Tinggi Kaitannya dengan Pengembangan IKIP menjadi Universitas. Oleh : Bambang Ruwanto & Supahar. ....	21
3. Perguruan Tinggi Sebagai Wahana Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh : Mujinem & Mami Hajaroh .....	31
4. Meramalkan Warna Zat Pewarna dengan Pendekatan Partikel dalam Kotak 1 - Dimensi. Oleh : Endang Widjajanti Laksono .....	41
5. Modifikasi Sintesis Zeolit A Sebagai Bahan Pengisi Deterjen (Builder). Oleh : Sri Handayani & Winarto .....	47
6. Radikal Bebas, Peroksidasi Lipida dan Antioksidan. Oleh : Indyah Sulistyo Arty .....	55
7. Pengembangan Mikropon OPTIK sebagai Alternatif Dalam Komunikasi Serat Optik. Oleh : Herman Dwi Surjono .....	63
8. Konservasi, Diversifikasi dan Peningkatan Efisiensi untuk Mengantisipasi Krisis energi. Oleh : Suparno & Yuli Astono .....	71
9. Memahami Konflik Orang Tua dengan Anak. Oleh : Sugito .....	83
10. Peranan Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. Oleh : Suyata .....	91
11. Postmodernisme Dalam Sastra. Oleh : Burhan Nurgiyantoro .....	109

12. Beberapa Masalah Penyusunan Kamus Ekabahasa (Jawa-Jawa).  
 Oleh : Hardiyanto ..... 127

13. Pendidikan Kesenian sebagai Penunjang Meningkatkan Sumber Daya Manusia.  
 Oleh : Sarwono ..... 135

14. Perang Diponegoro : Antara Gerakan Mahdisme dan Mistisisme Islam.  
 Oleh : Ajat Sudrajat ..... 149

15. Kecerdasan Emosional ( Tinjauan Buku Secara Kritisal).  
 Oleh : Yulia Ayriza ..... 161

## PERANG DIPONEGORO : ANTARA GERAKAN MAHDISME DAN MISTISISME ISLAM

Oleh :

Ajat Sudrajat

(FPIPS IKIP YOGYAKARTA)

### Abstrak

Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 - 1830 di wilayah Kasunanan Yogyakarta. Nama perang ini mengambil tokoh sentral dalam peristiwa itu yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, berbeda dengan kehidupan para pangeran istana pada umumnya, ia tidak menghabiskan waktunya dengan berbagai bentuk kehidupan yang menyenangkan dan diliputi kemewahan. Sejak usia muda Pangeran Diponegoro sudah berada di luar dan menyibukkan diri dengan mendalami berbagai pengetahuan termasuk mendalami ajaran Islam. Karena cara hidup yang seperti ini dan banyak berhubungan dengan para Ulama, kehidupan pribadinya mencerminkan bentuk kehidupan yang diliputi kesalehan dan kezuhudan kehidupan mistis. Iapun dikenal oleh para pengamat sebagai seorang Ksatria-ulama.

Dalam kehidupan sebagai seorang yang diliputi kesalehan dan kezuhudan, maka saat ia memimpin gerakan penentangan terhadap pemerintah kolonial Belanda banyak harapan dan penafsiran yang dikaitkan dengan gerakan tersebut. Sesuai dengan kondisi saat itu, ketika masyarakat berada dalam situasi sulit, tertindas baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi akibat penjajahan, ada sejumlah harapan yang dipikulkan ke pundak Pangeran Diponegoro. Dari harapan yang demikian itu maka kemudian Pangeran Diponegoro dilekati dengan sifat *mahdisme*, yaitu suatu harapan akan datangnya masa depan yang dipenuhi kemakmuran, kedamaian dan ketenteraman, baik dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran bahwa Perang Diponegoro termasuk kedalam gerakan yang disebut sebagai *mahdisme*.

Kata kunci : Gerakan Islam - Diponegoro

### Pendahuluan

Kedatangan bangsa Barat ke Asia Tenggara pada abad ke-15 dianggap sebagai ancaman bagi penguasa-penguasa lokal. Sejak kedatangan VOC di Indonesia menjelang abad ke-17, umat Islam di Nusantara telah menunjukkan rasa permusuhan mereka terhadap Belanda. Berulang kali pecah perlawanan lokal yang diinspirasi Islam.

Meskipun Belanda berhasil menundukkan sebagian besar kepulauan Nusantara, tetapi Islam tidak pernah lenyap bahkan semakin pesat perkembangannya, apalagi pada abad ke-18. Islam menerima dorongan yang segar dengan meningkatkan hubungan dengan pusat-pusat ortodoksi Islam Timur Tengah. Setiap tahun ribuan jamaah haji Indonesia pergi ke Mekkah dan pulang membawa ajaran-ajaran ortodok yang lambat laun menggeser mistisisme dan sinkretisme yang sebelumnya menonjol dalam Islam di Indonesia (Harry J. Benda, 1989 : 123).

Di Sumatra Barat muncul gerakan Padri (1821-1837), di Jawa muncul

Pangeran Diponegoro (1825-1830) dan di Aceh muncul Perang Sabil (1837-1904). Ketiga peperangan itu bercorak keagamaan. Namun dalam uraian ini penulis hanya akan membahas Perang Diponegoro sebagai gerakan mahdisme atau mistisisme Islam yang dipimpin oleh seorang Ksatria-ulama.

### Biografi Pangeran Diponegoro

Diponegoro lahir di Keraton Yogyakarta tanggal 11 Nopember 1785, tepat sebelum matahari terbit pada hari Jum'at Wage 7 Muharram 1200 H. Dalam urutan waktu Jawa, waktu dan tanggal kelahirannya dianggap bertuah (Peter Carey, 1986 : 23). Ia adalah putera sulung Hamengku Buwana III dari isteri selirnya R.A. Mangkarawati.

Semasa kecil Diponegoro bernama Raden Mas Antawirya, sesuai dengan tradisi karena ia putera raja, maka setelah dewasa diberi gelar Pangeran Diponegoro. Masa kanak-kanak dan remajanya banyak dihabiskan di luar istana, di Tegalrejo. Di bawah asuhan Ratu Ageng, isteri Sultan Hamengku Buwana I, yang amat saleh dan sangat taat pada ajaran agama Islam Pangeran Diponegoro mendapat pendidikan yang amat baik. Ia dengan bebas bisa bergaul dengan para ulama setempat yang terkemuka serta para santrinya. Ia juga mempunyai hubungan dengan hirarki keagamaan yang ada di Yogyakarta, terutama dengan anggota korp Suranatan yang bertindak sebagai penasehat keagamaan kerajaan (Peter Carey, 1986 : 42).

Berbeda dengan kebiasaan para bangsawan muda Yogyakarta, Pangeran Diponegoro jarang sekali muncul di istana, ia hanya hadir ke istana pada saat *grebeg*, upacara perayaan Islam yang diselenggarakan dua kali setahun. Sebaliknya ia banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama serta menyepi dan berziarah ke tempat-tempat keramat dan suci yang berhubungan dengan dinasti Mataram (Peter Carey 1986 ; 42). Selain mempelajari ajaran Islam dan mengamalkannya, Pangeran Diponegoro juga banyak membaca dan mempelajari buku-buku kesusasteraan Jawa seperti primbon, babad, dan silsilah raja (Sagimun M.D., 1984 : 3).

Setelah kematian Ratu Ageng (1803) Pangeran diponegoro mewarisi Tegalrejo. Ia berhasil membuktikan dirinya sebagai seorang pemilik tanah dan perkebunan yang cakap,cerdik dalam mengelola keuangan serta terbuka dan penuh tenggang rasa kepada orang-orang yang menyewa atau menggarap tanahnya sehingga ia dihormati dan dicintai rakyat.

Pendidikan yang ditempuh dan gaya hidup yang dijalani Pangeran Diponegoro menyebabkan ia terpisah dari orang-orang yang hidup sezaman dengannya di istana oleh karena penguasanya tentang teologi dan fiqh Islam. Meskipun demikian selama masa sulit dan kerusuhan (1808-1812) Pangeran Diponegoro kerap kali memberi saran kepada ayahnya, Sultan Hamengku Buwana III, dalam masalah pemerintahan seperti dalam perpajakan dan pengangkatan pejabat.

Pada tahun 1814 Pangeran Diponegoro menikahi puteri Raden Rangga Prawirodirjo, dengan demikian ia telah mengikat dirinya dengan keluarga pemberontak Yogyakarta di tahun 1810 yang menentang Deandels (Peter Carey, : 43). Ketika ayahnya meninggal dunia ia telah mempunyai kedudukan yang penting di istana, sebagai seorang pangeran senior yang berpengalaman serta sebagai lelaki yang lebih tua dari Sultan Hamengku Buwana IV.

Sebelum serbuan Inggris ke Yogyakarta pada tahun 1812, terdapat pembicaraan bahwa Pangeran Diponegoro hendak diangkat sebagai putera mahkota pada saat penobatan ayahnya dengan anggapan bahwa ia adalah anak laki-laki tertua. Pangeran Diponegoro menolak tawaran itu, baik karena ia tahu bahwa saudara laki-laknya lebih berhak karena ia putera dari isteri resmi Sultan meskipun ia masih kecil, maupun karena Pangeran Diponegoro memang tidak mempunyai minat untuk memiliki kekuasaan keduniaan di Yogyakarta. Namun secara terus menerus terdapat desas desus yang menyatakan bahwa ia mempunyai ambisi yang tersembunyi untuk mendapatkan kesultanan tersebut. Bermula dari masalah suksesi inilah muncul anggapan bahwa motif utama Perang Diponegoro adalah ambisinya untuk menduduki jabatan kesultanan di Yogyakarta.

### **Latar Belakang Perang Diponegoro**

Asal-usul Perang Diponegoro harus dicari di dalam sejarah kesultanan Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1755 sebagai hasil perjanjian Giyanti setelah pemberontakan yang dilakukan Pangeran Mangkubumi melawan Surakarta dan Belanda. Peta politik Jawa waktu itu menunjukkan bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur dibagi antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Mereka mengadakan hubungan dengan kompeni Belanda yang menguasai Jawa Barat dan daerah pesisir utara. Mangkubumi berharap dapat menyatukan kembali Jawa Tengah dan Jawa Timur dibawah kekuasaan Yogyakarta. Tatkala ia wafat (1792), Yogyakarta telah mapan sebagai sebuah kerajaan yang makmur dengan militer yang kuat di Jawa Tengah. Sayangnya sekali Sultan Hamengku Buwana II tidak bisa melanjutkan kebijaksanaan sultan sebelumnya. Dalam tempo singkat banyak para penasehat Mangkubumi diberhentikan. Sultan lebih banyak bersenang-senang dengan berburu dan mendirikan pesanggrahan baru yang memperbanyak tenaga kerja *corves* -kerja rodi dari penduduk setempat. Gaya pemerintahannyapun kurang bijaksana dan dilaksanakan dengan sembarangan. Pajak dilipat gandakan dengan cara pemerasan dan sikap Sultan terhadap wakil-wakil Belanda tidak mengenakkan (Peter Carey, 1986 : 31).

Pada bulan Juli 1808 Deandels mengeluarkan keputusan resmi yang mengangkat masalah upacara dan etiket. Isinya antara lain menetapkan bahwa residen Belanda bergelar menteri sesuai dengan kedudukan sebagai raja Louis dari Belanda dan dalam upacara resmi mereka diperlakukan sederajat dengan bangsawan (Peter Carey, 1986 : 32). Sultan sangat tersinggung kehormatannya tetapi tidak berdaya. Perang dingin itu pun memanasi dengan terjadinya persengketaan perbatasan daerah pesisir lalu memuncak ketika Deandels

memaksakan monopoli penebangan pohon jati. Di Yogyakarta Raden Rangga Prawirodirjo, ipar Sultan, bangkit memberontak pada Deandels pada tahun 1810. Dengan menggunakan simbol-simbol *Ratu adil*. R. Rangga banyak mendapat dukungan, termasuk dari Sultan, tetapi Deandels berhasil memadamkannya (Peter Carey, 1986 : 33-34). Peristiwa ini dapat dipandang sebagai pendahulu Perang Diponegoro, karena Sentot, putera R.Rangga kelak ikut serta dalam Perang Diponegoro dan puteri sang pemberontak itupun diperistri Diponegoro (Peter Carey, 1986 : 34).

Setelah berhasil menindas pemberontakan R.Rangga, Deandels bertindak lebih keras. Pada tanggal 31 Desember 1810 Sultan Yogyakarta dipaksa memakzulkan dirinya dan menyerahkan pemerintahannya kepada anak laki-laknya sebagai Pangeran Wakil Raja. Lebih dari itu Sultan juga dituntut membayar pampasan perang hampir setengah juta gulden. Lalu disusul dengan pemaksaan perjanjian baru (Juni 1910) yang berisi penyerahan wilayah-wilayah yang luas kepada pemerintahan pusat serta diakhiri pembayaran tahunan *strandgeld* (uang pantai). Deandels berhasil memecah belah kesultanan Yogyakarta dan mewariskan kegelisahan serta keresahan politik.

Bulan Mei 1811, Gubernur Jenderal yang baru, Jan Willem Janssen, mulai mengadakan liberalisasi yang lebih keras. Namun hal itu segera diredam dengan kehadiran ekspedisi tentara Inggris yang terdiri dari orang-orang India dan Sepoy pada bulan Agustus-September. Kesempatan baik itu digunakan oleh Sultan Sepuh untuk membalas dendam kepada Belanda, membunuh patih, serta memecat anaknya dari Wakil Raja (Peter Carey, 1986 : 36).

Residen Inggris, Jhon Crawford, terpaksa menerima kenyataan itu meskipun dalam laporannya kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles ia lebih suka jika putera mahkota yang menjadi sultan. Raffles merasa belum saatnya untuk menjalankan kebijaksanaan yang keras menghadapi Sultan Sepuh, maka pada waktu kedatangannya ke Jawa Tengah (Desember 1811) ia menandatangani perjanjian dengan penguasa setempat yang membatalkan perampasan-perampasan wilayah yang pernah dilakukan Deandels.

Hal itu telah mendorong Sultan Sepuh untuk bertindak lebih berani lagi. Ia melakukan persiapan militer dan menjalin persekongkolan rahasia dengan Surakarta untuk menghadapi Inggris. Persekongkolan itu tercium oleh Inggris karena Raffles telah menempatkan Pangeran Natakusuma sebagai mata-matanya didalam istana Yogyakarta. Raffles dengan ekspedisi militernya segera datang ke Yogyakarta dan karena Sultan tidak bersedia untuk berunding maka istanapun diserang (19-20 Juni 1812). Akibatnya Keraton dirampok, barang-barang berharga serta naskah-naskah penting dicuri, bahkan sejumlah uang dari khazanah keraton nampaknya telah dikuasai oleh Raffles sendiri. Sultan Sepuh ditawan dan dibuang di Pulau Pinang dan pada tanggal 22 Juni 1812 putera mahkota dinobatkan kembali sebagai Sultan Hamengku Buwana III (Peter Carey, 1986 : 37).

Selanjutnya Inggris melangkah lebih jauh lagi. Pada tanggal 1 Agustus 1812 ditetapkan perjanjian baru yang mengesahkan perampasan berbagai daerah mancanegara, termasuk Kedu dan pelaksanaan bandar-bandar (gerbang-gerbang tol) dan pasar-pasar diambil alih oleh Inggris serta kasus-kasus hukum yang timbul harus mengacu pada undang-undang umum Inggris (Peraturan Raffles 11 Februari 1814). Itu semua semakin membebani rakyat yang sekaligus juga memperlemah kerajaan. Kasunanan Surakarta juga kena getahnya meskipun tidak separah kasultanan Yogyakarta. Raffles lalu menobatkan Natakusuma sebagai pengeran yang merdeka dan berdaulat tahun 1813 dengan gelar Paku Alam yang hanya bertanggung jawab kepada Inggris (Peter Carey, 1986 : 38).

Sultan Hamengku Buwana II berusaha mengadakan perbaikan keuangan dan pemerintahan. Penghematan dilakukan di istana, pajak uang diganti dengan pajak pelayanan santunan, proyek Sultan II dihentikan, dan gaji pegawai keraton diperhatikan serta hubungan dengan Inggris diperbaiki. Sayang sekali masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana III ini singkat, ia wafat tanggal 3 Nopember 1814 setelah menderita sakit. Sebagai penggantinya, Raden Mas Jarot, adik Diponegoro tetapi dari isteri resmi Sultan. Karena ia masih kecil, maka ia didampingi oleh wali sampai bulan Juli 1820. Mula-mula sebagai wali raja adalah Paku Alam, tetapi ia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri. lalu wakil raja dipercayakan kepada Ibu Sultan, ratu ibu dan Ketua menteri, Patih Danurejo IV, keturunan Untung Surapati yang berdarah Bali. Pada saat penyerahan kembali Pulau Jawa kepada Belanda tahun 1816, Sultan didampingi oleh ratu ibu, Patih Danurejo IV, dan Mayor Wiranegara, komandan pasukan pengawal Sultan. Ketiga orang inilah yang banyak mewarnai pemerintahan masa Sultan Hamengku Buwana IV yang banyak dikritik oleh Pangeran Diponegoro.

### **Pecahnya Perang Diponegoro**

Pangeran Diponegoro mulai terlibat politik langsung sejak masa pemerintahan ayahnya, Hamengku Buwana III. Karena ia tinggal diluar istana, ia tahu betul penderitaan rakyat akibat kebijaksanaan yang dijalankan penguasa dalam kerja sama dengan Belanda. Lebih dari itu sebagai ksatria Jawa ia melihat bangsa Eropa telah melanggar norma-normadan tata susila adat Jawa yang diagungkan, demikian pula sebagai ulama ia melihat bangsa Eropa sebagai orang-orang kafir.

Secara khusus Diponegoro tidak menyetujui gaya pemerintahan Patih Danurejo IV yang korup dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketika Gubernur Jenderal Belanda van der Cappellen (1816-1826) membatasi tanah yang dimiliki orang Eropa, maka residen Nahuya dan teman-temannya justru dapat menyewa tanah secara besar-besaran dari para penguasa merdeka, termasuk Sulatan Hamengku Buwana IV yang belum dewasa, berikut kebijaksanaan patih karena dianggap menguntungkan diri sendiri. Pada tahun

1822, tanah yang tersewa di Yogyakarta 115 desa dan di Surakarta 166 desa (Peter Carey, 1986 : 45). Akibat dari persewaan tanah tadi adalah rusaknya tatanan masyarakat pedesaan dan timbulnya gaya hidup baru yang kebarat-baratan yang ditandai dengan kemewahan, perjudian dan mabuk-mabukan.

Dalam bidang politik, kematian Sultan Hamengku Buwana IV secara mendadak mempertegang hubungan Diponegoro dengan keluarga keraton. Sultan Hamengku Buwana V yang berusia tiga tahun perwaliannya diserahkan kepada ratu ibu, ibu sultan, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Mangkubumi. Perwalian itu hanya berlaku didalam lingkup istana karena pelaksanaan pemerintahan atas seluruh tanah sultan tetap ditangan Patih Danurejo IV yang terus memerintah dibawah pengawasan residen Belanda. Kenyataan itu sangat menjengkelkan Diponegoro karena tidak bisa membimbing keponakannya dalam menjalankan pemerintahan, misalnya dalam kasus sengketa ganti rugi tanah-tanah sultan yang disewakan yang memberatkan sultan tetapi disetujui oleh patih (Peter Carey, 1986 : 55).

Hubungan Diponegoro dengan Danurejo semakin tegang karena tindakan patih yang sewenang-wenang memecat beberapa sahabat Diponegoro (Peter Carey, 1986 : 59-61). Hal itu diperparah dengan sikap dan tindakan wakil-wakil pemerintahan Belanda. Misalnya pembantu residen Chevallier dan J.G. Dietree. Keduanya selain bekerja sama dengan patih dalam transaksi keuangan dan menjual barang-barang keraton, juga menjalin hubungan gelap dengan perempuan-perempuan dikalangan istana; Dietree misalnya mengadakan hubungan gelap dengan isteri kedua Mangkubumi sedang Chevallier dengan salah seorang selir Diponegoro (Peter Carey, 1986 : 62). Juga dalam sebuah resolusi rahasia yang diputuskan tanggal 9 maret 1823 pada saat penobatan Paku Buwono VI, van der Capellen telah mengisyaratkan rencana penempatan Yogyakarta dan Surakarta langsung dibawah pemerintahan pusat.

Keresahan yang menumpuk nampaknya tinggal menunggu saatnya untuk meledak. Sejak bulan Mei 1825 Pangeran Diponegoro mulai mengurangi pajak-pajak agar rakyat yang mengerjakan dan menyewa tanahnya dapat membeli senjata dan perbekalan guna menghadapi konflik yang akan segera pecah. Pada bulan yang sama Smissaert memutuskan untuk memperbaiki dan meningkatkan jalan-jalan samping disekeliling ibu kota kerajaan dan salah satu jalan tersebut menyusuri batas-batas tanah Diponegoro di Tegalrejo. Pematokan jalan dilaksanakan oleh Danurejo IV tanpa seizin Diponegoro, maka meletuslah persengketaan dan berkobar menjadi Perang Jawa yang bersejarah.

Usaha pemanggilan Diponegoro ke Yogyakarta gagal bahkan Pangeran Mangkubumi berbalik memihak kepada Diponegoro, maka pada tanggal 20 Juli 1825 Tegalrejo diserang Chevallier, pertempuran berkobar, griya Tegalrejo dibakar tetapi Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi dan kebanyakan pengikutnya berhasil menyingkir ke Goa Slarong. Dan dari sinilah operasi pemberontakan dikendalikan. Dalam waktu singkat pemberontakan segera meluas ke daerah-daerah Bagelen, Kedu, Brebes, Tegal, Pekalongan,

Semarang dan Rembang. Seluruh Jawa Tengah dilanda api peperangan. Bahkan pertempuran juga terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur seperti di Bojonegoro. Madiun, Nganjuk dan Kertosono.

Pangeran Diponegoro banyak mendapat dukungan dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat, petani, santri, ulama serta para bangsawan. Lima belas dari dua puluh sembilan pangeran Yogyakarta bergabung dengan Diponegoro seperti Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Ngabehi Jayakusuma (Peter Carey, 1986 : 67). Dukungan besar diberikan oleh Kyai Mojo beserta santrinya, juga oleh banyak kyai dari berbagai pesantren di Jawa Tengah. Menurut Peter Carey, diantara pengikut Diponegoro 88 orang bergelar kyai, 36 haji, 11 syekh, 18 pegawai keagamaan, 15 kyai-guru dan 3 nyai (Peter Carey, 1987 : 276). Jumlah itu mungkin tidak akurat, tetapi dapat menggambarkan antusiasme kaum agama mendukung Pangeran Diponegoro.

Dua tahun pertama Pangeran Diponegoro dan pendukungnya banyak memperoleh kemenangan, ia berhasil mengobarkan semangat *perang sabil* melawan Belanda yang kafir. Pasukan Diponegoro diatur secara rapi dalam kelompok-kelompok, masing-masing mempunyai panji-panji tersendiri seperti *Bulkio-bulkio*, *Turkio-turkio*, dan *Arkio-arkio* yang mencontoh dari resimen Jennissary dari sultan-sultan di zamian kerajaan Turki Utsmani (Sagimun, 1984 ;21-23).

Pangeran Diponegoro pun menggunakan gelar *Sultan Ngabdulkamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Jawa Khalifat Rasulullah* (Peter Carey, 1987 : 279). Sebagai Erucakra (Ratu Adil) ia bertujuan menjadi *Ratu Paneteg Panatagama ingkang amumpuni luhure agami Islam ing Tanah Jawa kabeh* ( Raja pengatur urusan agama yang menjaga ketinggian agama Islam di seluruh tanah Jawa). Hal ini dipertegas dengan surat yang ditulis Mangkubumi kepada Jenderal de Kock bulan Agustus 1825 antara lain *ingkang dados kersane Ki Arya Dipanegara boten lir tang namung tetepe Agame Kanjeng Nabi Muhammad saw.* ( yang menjadi kehendak Pangeran Diponegoro tidak lain hanya kelestarian agama Nabi Besar Muhammad saw.) (Peter Carey, 1987 : 279).

Keadaan perang Jawa berbalik setelah Jenderal de Kock berhasil menghimpun pasukan dan persenjataan serta mengkonsolidasi penyerangan. Pangeran Diponegoro banyak mengalami kesulitan dan satu persatu pendukung dekatnya meletakkan senjata mulai dari Pangeran Mangkubumi, Alibasah Sentot, dan Kyai Mojo. Akhirnya Pangeran Diponegoro dengan pasrah menerima nasibnya yang tragis ditawan Belanda dengan keji dan licik di Magelang dalam upayanya berunding mencari perdamaian pada bulan Maret 1830. Pangeran Diponegoro tetap menuntut status sebagai *Ratu Paneteg Panatagama* tetapi tidak digubris Belanda. Ia

segera dikirim ke Menado lalu dipindah ke Makassar dan meninggal disana tahun 1855. Dengan ditawannya Pangeran Diponegoro praktis berakhir Perang Jawa yang merupakan pemberontakan pangeran Jawa yang terbesar dan terakhir dan mulailah lembaran baru zaman imperialisme Barat baru.

### Analisis dan Penutup

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa Perang Diponegoro adalah unik. Perang itu berbeda dengan perang-perang yang pernah berlangsung di Jawa meskipun keduanya sama-sama melibatkan kekuatan asing bangsa Eropa. Perang Diponegoro berskala lebih besar, baik cakupan luas wilayah pertempurannya maupun besar jumlah orang-orangnya yang terlibat maupun korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Lebih dari itu, Perang Diponegoro selain berdimensi politis, ia juga berdimensi keagamaan yang signifikan. Permasalahannya, dapatkah Perang Diponegoro yang memiliki dimensi keagamaan itu bisa dipandang sebagai sebuah gerakan mahdisme atau mistisisme islam?

*Mahdisme* adalah sebuah konsep ideologis yang didasarkan atas kepercayaan dan harapan akan datangnya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh kedamaian dan kemakmuarn. Harapan yang demikian dipikulkan kepada seseorang yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-Mahdi* (Arab) atau *Ratu Adil* (Jawa). Gerakan-gerakan mahdisme seringkali muncul ke permukaan dalam tindak kekerasan berupa pemberontakan, baik pemberontakan kecil maupun pemberontakan besar yang sanggup bertahan dalam masa yang cukup panjang. Sumber pemberontakan adalah rasa tidak puas terhadap keadaan, apakah mengenai masalah sosial, ekonomi atau politik. Keadaan ini mencakup juga berbagai gejala yang menunjukkan adanya kebencian yang kuat terhadap penguasa asing, yang dianggap bertanggung jawab atas kehancuran suatu masyarakat, dan hasrat untuk kembali kepada masyarakat yang dipenuhi ketenteraman dan kedamaian. Menurut A.P.E. Korver (1985 : 74) kebanyakan gerakan pemberontak di Indonesia memiliki corak mahdisme, yaitu pemberontakan yang disertai kepercayaan akan terciptanya suatu negara bahagia yang dipimpin oleh seorang mahdi. Sang Mahdi itu dalam tradisi Jawa adalah tokoh yang dikenal sebagai Ratu Adil, yang suatu ketika akan membawa kemerdekaan, ketenteraman, kedamaian dan kemakmuran pada rakyatnya. Dalam kasus Perang Diponegoro, maka Diponegoro dipandang sebagai al-Mahdi atau Ratu Adil.

*Mistisisme* adalah suatu bentuk kehidupan yang bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Intisari dari mistisisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara manusia dengan Tuhan dengan cara melakukan kontemplasi dan pengasingan diri (Harun Nasution, 1973 : 56). Untuk mencapai tujuan seperti itu seseorang harus menempuh jalan panjang yang berisi tahapan-tahapan (maqamat) tertentu, umpamanya kalau dalam mistisisme Islam : tobat, zuhud, sabar, kefakiran, kerendahan hati, taqwa, tawakal, kerelaan, cinta dan ma'rifat. Jalan

yang harus dilalui seorang mistikus tidaklah mudah dan dapat ditempuh dengan gampang dan dalam waktu yang pendek. Jalan itu sulit, dan untuk pindah dari satu tahapan ke tahapan yang lain menghendaki suatu usaha yang berat dan waktu yang tidak singkat. Terkadang seorang mistikus harus bertahun-tahun berada tinggal dalam tahapan tertentu sebelum naik ke tahapan berikutnya.

Peter Carey dalam bukunya *asal-usul Perang Jawa* menyatakan bahwa tujuan-tujuan keagamaan dalam Perang Diponegoro tidaklah harus berarti bahwa Diponegoro melihat dirinya sebagai *Imam Mahdi*, karena pada waktu itu di Pulau Jawa tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang bersifat mahdisme, walaupun konsep yang demikian itu kelak pada abad ke sembilan belas dikenal di beberapa wilayah di Jawa Barat. Sedang ilham tentang *perang sabil* dan pandangan terhadap Diponegoro sebagai *ratu paneteg Pananataka* lebih banyak berasal dari kepercayaan-kepercayaan orang Jawa yang tradisional (Peter Carey, 1986 : 70).

Penulis berpendapat bahwa dalam batas tertentu Perang Diponegoro dapat digolongkan sebagai gerakan mahdisme tetapi bukan gerakan mistisisme Islam. Sebagai pribadi Pangeran Diponegoro memang sangat terpengaruh oleh ajaran mistisisme Islam yang bercorak Jawa, langkah-langkah yang diambil sebelum meletus perang pun menunjukkan kecenderungan itu. Ini disebabkan karena Diponegoro tidak hanya mempelajari kitab-kitab agama Islam dan kitab-kitab Jawa kuno yang berisi hukum, melainkan juga pelajaran-pelajaran keluhuran rohani. Cerminan dari hidup yang bercorak mistis diperlihatkan dengan kesederhanaan hidupnya, kesalehannya dan ketaatannya menunaikan kewajiban agama. Sebagai seorang Pangeran, beliau dapat hidup megah dan mewah serta bersenang-senang sesuka hatinya, namun beliau memilih hidup sederhana ditengah-tengah rakyatnya yang menderita (Sagimun, 1986 : 39). Di sisi lain pengikut dan pendukung gerakannya serta yang terlibat didalamnya bersifat heterogin, santri dan abangan serta priyayi meminjam istilah geertz. Mereka tidak terikat pada suatu ikatan sebagaimana layaknya tarekat atau kelompok-kelompok sufi yang harus menjalankan suatu faham mistik tertentu atau dalam bentuk persaudaraan-persaudaraan sufi. Dengan demikian sungguhpun Diponegoro banyak menggunakan simbol-simbol mistis didalam kehidupan pribadinya tidak berarti bahwa gerakan Diponegoro adalah gerakan mistisisme.

Selanjutnya dalam batas tertentu, dapat dikatakan bahwa Perang Diponegoro dapat digolongkan gerakan *Mahdisme*, yaitu dalam pengertian mahdisme sebagai *millenarisme*, *suatu gerakan keagamaan yang didorong oleh harapan akan datangnya masa depan yang tenang dan damai dibarengi kehidupan yang makmur*. Sebab ketenangan, kedamaian dan kemakmuran yang diharapkan dalam Perang Diponegoro itu memenuhi kriteria untuk dapat dianggap sebagai gerakan millenarisme atau mahdisme seperti yang diajukan oleh Norman Cohn (Norman Cohn, 1984 : 38). Bahwa ketenangan, kedamaian dan kemakmuran itu adalah :

- a. Bersifat kolektif, dengan pengertian dapat dialami oleh semua pengikut gerakan tersebut.
- b. Bersifat *terrestrial*, dengan pengertian bahwa ketenangan, kedamaian dan kemakmuran itu akan terjadi di dunia ini dan bukan di akherat kelak.
- c. Bersifat segera, dengan pengertian bahwa masa penuh kemakmuran itu akan tiba dengan segera tanpa terduga-duga.
- d. Bersifat total, dengan pengertian bahwa masa damai penuh kemakmuran itu secara total akan berubah kehidupan di dunia ini, sehingga yang terjadi bukanlah perbaikan semata-mata tetapi menyempurnakan terhadap keadaan-keadaan di dunia.
- e. Dilaksanakan oleh agen-agen yang secara sadar dipandang sebagai kekuatan super natural.

Sifat-sifat diatas dalam batas tertentu memang sesuai dengan harapan-harapan para pendukung Perang Diponegoro yang heterogin itu. Hal itu semakin jelas kalau dianalisis mengapa gerakan tersebut berkembang menjadi gerakan milleniarisme dengan hipotesa-hipotesa sosio-psikologis yang diajukan Norman Cohn (Norman Cohn, 1984 : 57-78).

Pertama, didalam pandangan keagamaan tradisional Islam Jawa terdapat janji mengenai masa depan yang penuh bahagia, ketenteraman dan kemakmuran yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Janji tradisional inilah yang memberikan landasan bagi munculnya keyakinan millenarian dan mahdisme.

Kedua, Diponegoro dengan dibantu Kyai Mojo mampu mengadaptasi harapan-harapan tradisional tersebut dan dengan kepribadiannya yang cocok, ia sanggup menyampaikan pesan mutlak perang sabil maka didalam situasi-situasi tekanan emosional yang sedang berlangsung Diponegoro tampil sebagai pusat dari gerakan Perang Diponegoro atau dengan lain kata Diponegoro berperan sebagai al-Mahdi atau Ratu Adil.

Ketiga, pada setiap jiwa ada hasrat kebebasan mutlak dari penderitaan, yaitu lepasnya dari cengkeraman penjajahan Belanda yang telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Hasrat tersebut pada era pengikut Diponegoro semakin bergolak karena rasa frustrasi, kegelisahan atau kehinaan yang tak dapat diterima dan tak dapat ditanggulangi baik dengan pemikiran maupun kegiatan rutin secara kelembagaan. Karena hal itu dialami secara bersama oleh sejumlah individu ditempat yang sama maka terjadilah agitasi emosional kolektif yang punya intensitas tinggi dan tidak terbatas tujuannya, yang akhirnya terwujud dalam sebuah gerakan pemberontakan.

Keempat, Situasi yang seperti diatas memberi kesempatan kepada Pangeran Diponegoro untuk menjanjikan kedamaian, ketenangan dan

kemakmuran kolektif yang bersifat segera dan total. Ledakan-ledakan emosional yang telah menumpuk itulah yang memberikan energi kepadagerakan millenarian atau mahdisme Diponegoro.

Karena masyarakat Jawa secara tradisional telah mengenal konsep millenarisme dengan istilah Kali Yuga, Erucakra atau Ratu Adil seperti dalam ramalan Jaya Baya, Pujangga Jawa abad ke-12, maka tidaklah berlebihan kalau gerakan Diponegoro dipandang sebagai gerakan mahdisme, suatu gerakan millenarian yang bercorak Islam. Perang Diponegoro sebagai gerakan mahdisme Islam secara politik mengalami kegagalan tetapi ia telah mendorong proses Islamisasi dan santrinisasi yang lebih lanjut di Jawa dan pada waktu yang sama ia semakin mempertegas dikotomi antara penjajah dan pribumi.

#### Daftar Pustaka

- Benda, Ha. (1989). "Christian Snouck Hourgronje dan Landasan Kebijakan Belanda terhadap Islam di Indonesia", dalam Ahmad Ibrahim dkk. (ed.), *Islam di Asia tenggara : Perspektif Sejarah*. Jakarta : LP3ES.
- Carey, P. (1986). *Asal-usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*. Jakarta : Pustaka Azet.
- (1987). "Satria and Santri : Some Notes on the Relationship between Dipanegarar's Kraton and Religious Supporters During the Java War (1825-1830)", dalam *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Chon, N. (1984). "Millenarisme Zaman Pertengahan : Hubungannya dengan Studi Komparatif Gerakan-Gerakan Millenarian", dalam Sylvia Thrupp (ed.), *Gerakan Kaum Mahdi*. Bandung : Pustaka.
- Korver, A.P.E. (1985). *Sarekat Islam : Gerakan Ratu Adil*, Jakarta : Grafiti Pers.
- Nasution, H. (1973). *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sigmund., M.D. (1984). *Pangeran Diponegoro*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.